

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang pembangunan ekonomi masih menjadi tantangan dan kendala pada negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Hal ini terlihat pada banyaknya komponen dalam perekonomian termasuk banyaknya orang yang menganggur. Peningkatan orang yang menganggur terlihat dari keadaan suatu negara dalam perekonomiannya apakah mengalami perkembangan melambat atau terjadi kemunduran. Masyarakat yang tergolong kriteria bekerja namun tidak memiliki pekerjaan maka termasuk pengangguran. Pengangguran juga disebut dengan keadaan seorang yang termasuk angkatan kerja dan sedang atau memiliki harapan memperoleh pekerjaan namun belum mendapatkannya (Sukirno, 2019). Ketika pengangguran tidak ditangani sebagaimana yang diharapkan, maka dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Permasalahan pengangguran merupakan hal yang berguna pada perekonomian karena pengangguran menjadi salah satu indikasi untuk mengukur besarnya pembangunan ekonomi.

Di sisi lain Indonesia juga menduduki angka terbesar ke empat di dunia dengan jumlah penduduk terbesar sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah pengangguran, yaitu pada ketenagakerjaan.

Selain itu Indonesia termasuk dalam jumlah pengangguran terbuka yang masih tinggi dan pemerintah daerah masih kesulitan mengatasi hal tersebut. Sehingga untuk dapat terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat akan sandang, pangan, prasarana kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan lapangan kerja dalam hal ini pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bersinergi serta berperan lebih besar agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut misalnya masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan dirinya, hilangnya pekerjaan serta pendapatan, angka putus sekolah bertambah, meningkatnya angka kriminalitas, menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan politik, menghambat investasi dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Dari berbagai dampak buruk lainnya, salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara yaitu mengurangi pengangguran. Karena terjadinya pengangguran yang terus-menerus dapat menimbulkan efek buruk pada psikologis penganggur serta keluarganya.



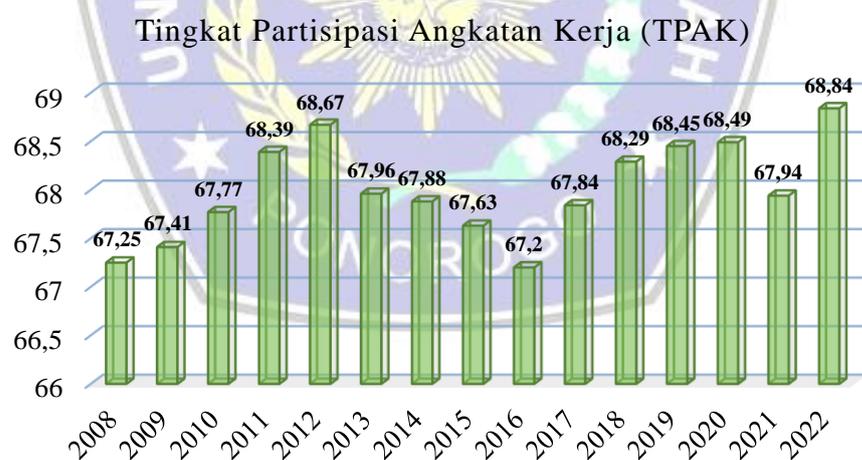
Gambar 1. Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2008-2022

Sumber : BPS Indonesia.

Di Tahun 2019, terdapat penurunan pada tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 5,10% tetapi tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan sejumlah 6,37% . Masa pandemi covid-19 kemarin terjadi perlambatan ekonomi dan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Selain itu, sejumlah pelaku usaha terpaksa memutuskan hubungan kerja demi menekan biaya produksi (PHK). Perusahaan yang melakukan pengurangan adalah mereka yang mengandalkan kegiatan impor. Alasannya karena nilai tukar naik sehingga mengurangi biaya tenaga kerja dan menurunkan biaya produksi, sehingga mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengatasi fenomena tersebut pemerintah juga aktif mengambil peran dalam mengupayakan peningkatan produktivitas serta menghasilkan lapangan kerja, namun seringkali tidak tersampai pada seluruh kelompok atau golongan masyarakat. Dikarenakan potensi yang dimiliki pada setiap orang memiliki perbedaan satu sama lain, sama seperti dalam proses pembangunan, tingkat penduduk yang tinggi dan banyaknya orang menganggur menjadi angka yang kurang dalam meningkatnya pembangunan. Akibatnya, ketidaksempurnaan situasi pasar tenaga kerja saat ini menyebabkan kesenjangan sosial. Ini karena penawaran (supply) di tempat kerja telah terjadi peningkatan dalam memenuhi posisi yang ada (Izzah, 2015).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu tolak ukur yang kerap digunakan dalam melihat dampak dari partisipasi penduduk usia kerja itu sendiri dalam kontribusinya di

lingkup kegiatan ekonomi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai alat perbandingan pada penduduk yang ada dalam kegiatan ekonomi atau disebut juga angkatan kerja (sedang bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap keseluruhan penduduk yang tergolong dalam kriteria usia kerja. Permasalahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia masih tinggi dan berbanding terbalik pada banyaknya masyarakat yang sudah bekerja. Hal ini memperlihatkan peningkatan pekerja di Indonesia tergolong tinggi serta memberi dampak peningkatan pengangguran karena ketersediaan lapangan kerja yang kurang (BPS Indonesia). Penjelasan dalam keadaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang ada di Indonesia tahun terakhir terlihat di gambar:



Gambar 2. Presentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2008-2022

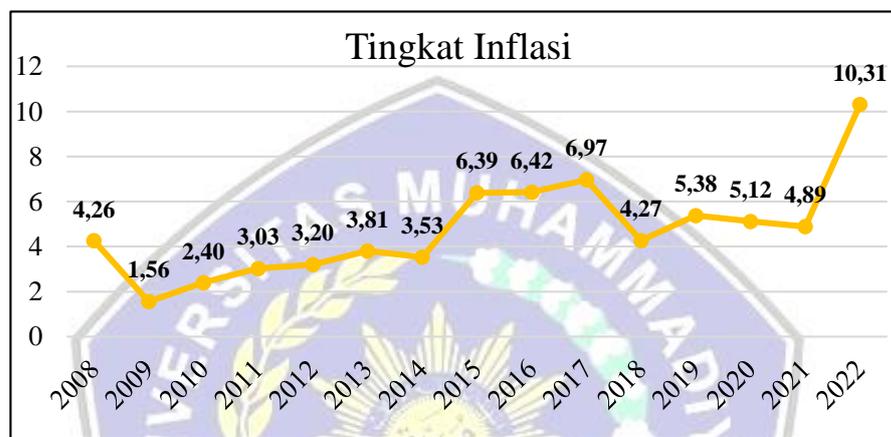
Sumber : BPS Indonesia.

Gambar 2. menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja menurut Provinsi se-Indonesia selama kurun waktu 2018-2022 terjadi kenaikan setiap tahunnya. Tetapi juga mengalami penurunan pada 2021

sebanyak 67,94% dikarenakan banyak pekerja yang harus di PHK. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada 2022, hal ini seiring dengan penambahan jumlah penduduk produktif serta menjadi wujud berubahnya struktur ekonomi dalam pertanian ke industri kemudian berpindah ke jasa. Selain itu pada tahun tersebut menjadi masa peralihan new normal yang kemudian seluruh elemen perekonomian mengalami perbaikan serta pembaharuan. Meski masih nampak tinggi jika dilihat dari beberapa sektor pertumbuhannya tetapi penyerapan tenaga kerja cenderung kecil. Indonesia memiliki penduduk sejumlah 275,77 juta jiwa pada tahun 2022 (BPS Indonesia). Banyaknya jumlah tersebut setengahnya merupakan golongan bekerja, sehingga termasuk pada masalah tenagakerja di Indonesia. Kemudian juga terjadinya masa pandemi covid-19 kemarin merupakan masa melemahnya perekonomian dunia, tidak ada aktivitas yang dilakukan diluar rumah. Mengakibatkan pendapatan negara menurun sehingga terjadi inflasi, pemerintah dan hasilnya digunakan untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dilihat dari perspektif ekonomi, inflasi disebut sebagai fenomena dimana posisi naik turunnya cenderung mengakibatkan terjadi gangguan perekonomian pada suatu negara. Maka dari itu Inflasi menjadi satu bagian yang dapat digunakan sebagai indikator perekonomian yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan serta tidak baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Inflasi juga dapat tercipta dari kegiatan ekonomi yang mengeluarkan

biaya, seperti melakukan biaya peminjaman lebih besar pada negara ini baik secara domestik atau internasional dalam perbandingan negara berkembang lain (Investment, 2024). Sedangkan menurut (Harjunata, 2016) Inflasi tidak akan menjadi permasalahan yang besar apabila dapat diimbangi dengan ketersediaan barang kebutuhan dan diiringi pula dengan kenaikan tingkat pendapatan yang lebih besar.



Gambar 3. Presentase Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2008-2022
Sumber : Bank Indonesia.

Gambar 3. menjelaskan bahwa inflasi mengalami pergerakan yang cukup meningkat dan mengalami penurunan sehingga memiliki sifat fluktuatif ataupun dapat mengalami perubahan. Pada 5 tahun terakhir inflasi paling besar terjadi pada tahun 2022, hal ini disebabkan karena penekanan nilai global, gangguan supply pangan, serta kebijakan menyesuaikan BBM, selain itu juga karena meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan membaiknya kondisi pandemi covid-19 (Kemenkeu, 2024). Semua negara di dunia menjadikan inflasi sebagai permasalahan yang sering dihadapi, maka dari itu tingkat inflasi menjadi ukuran suatu negara dalam mengukur

seberapa baik buruknya permasalahan ekonomi yang diterjadi. Bukan hanya, ketika tingkat infasi tinggi maka akan muncul permasalahan daya beli masyarakat yang menurun. Untuk bisa mempertahankan perilaku konsumtif yang melekat pada masyarakat sebelumnya, maka para pekerja harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi. Namun pada kenyataannya kenaikan upah para pekerja masih kalah dengan percepatan kenaikan inflasi.

Kenaikan upah sering kali mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan permintaan tenaga kerja yang biasanya diikuti oleh penurunan upah. Ini memperlihatkan terjadi timbal balik diantara banyaknya pekerja pada tingkatan gaji, karena gaji mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang dapat diterima bekerja. Ketika upah dinaikkan, biaya produksi meningkat sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mencari efisiensi yang dapat mengarah pada pengurangan pekerja dan akhirnya tingkat pengangguran akan lebih tinggi. Untuk mengetahui perkembangan besarnya nilai upah minimum di Indonesia selama periode 15 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Upah Minimum Regional/Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2022 Dalam Rupiah

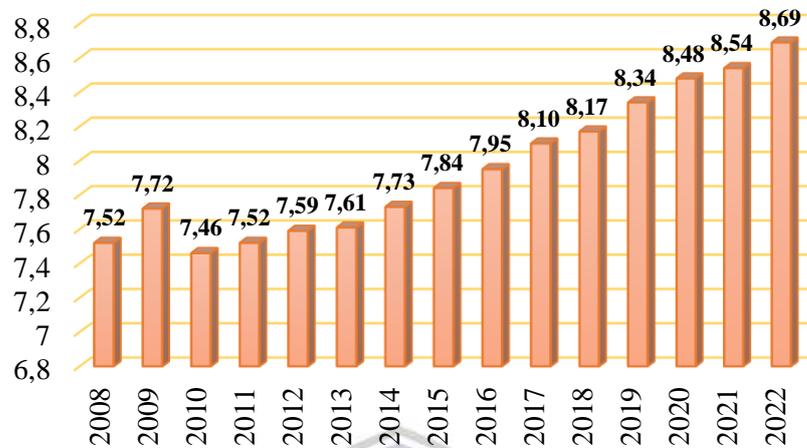
Sumber : BPS Indonesia.

Selama kurun waktu 2008-2022 upah minimum di Indonesia terjadi kenaikan pada setiap tahun, dimana peningkatan ini karena permintaan dari buruh. Pada tahun 2018 upah minimum ini masih berada di kisaran Rp. 2.268.874 dan pada tahun 2022 kemarin upah minimum di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih besar yaitu mencapai Rp. 2.737.419. Hal ini dapat terjadi karena harga kebutuhan yang semakin meningkat serta diiringi dengan kondusifnya pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia sehingga mengalami pertumbuhan yang meningkat. Hal ini dapat terjadi karena harga kebutuhan yang semakin meningkat serta diiringi dengan kondusifnya pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia sehingga mengalami pertumbuhan yang positif. Selain itu, juga disebabkan oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Namun jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah, maka akan terjadi penurunan

jumlah pekerja dan artinya akan terjadi peningkatan pada pengangguran. Karena tingginya nilai gaji yang disebabkan sehingga dapat berdampak pada biaya ditimbulkan sebuah perusahaan. Sehingga, dunia usaha akan mengurangi jumlah karyawan demi meningkatkan efisiensi.

Semakin majunya perkembangan zaman, banyak perusahaan memberikan persyaratan bagi pekerja yang mempunyai pengetahuan tinggi. Sehingga konteks tersebut menjelaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam proses mencari pekerjaan agar dapat terserap maksimal pada lapangan kerja. Makin tinggi tingkatan pendidikan individu sehingga makin tinggi keahlian kerjanya (*the working capacity*) atau pun produktif seseorang ketika bekerja (Agilia Febianti dkk. 2023). Hal ini disebabkan seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai berbagai keterampilan dan mampu meningkatkan kesempatan kerja. Banyak pula dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi tetapi tidak maksimal terserap pada dunia kerja, karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia untuk mereka. Selain itu, pekerja yang berpendidikan tinggi mungkin menerima tawaran kerja yang kurang sama pada kemampuan serta tingkat pendidikan yang sudah mereka selesaikan, akibatnya akan menambah angka pengangguran. Pendidikan dapat diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah.

Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia



Gambar 5. Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2008-2022 Dalam Tahun

Sumber : BPS Indonesia.

Tahun 2018, rata-rata waktu sekolah masyarakat Indonesia adalah 8,17 tahun, tahun 2020 adalah 8,48 tahun. Tetapi nilai tersebut memperlihatkan rata-rata waktu sekolah 8 tahun dan berarti warga Indonesia mempunyai pendidikan terakhir tahun kedua Sekolah Menengah Pertama (SMP). Memperlihatkan rata-rata sekolah di Indonesia kurang meskipun Program Wajib Belajar 12 Tahun telah berjalan. Terdapat wilayah rata-rata sekolah di Indonesia pada tahun 2022 adalah Provinsi Jakarta memiliki rata-rata 11,31 tahun ataupun sama seperti kelas di Sekolah Menengah Atas (SMA). Rata-rata lama sekolah tinggi berikutnya yaitu Kepulauan Riau, Maluku, Kalimantan Timur, dan Yogyakarta. Namun pada data hanya beberapa Provinsi di Indonesia yang mempunyai lama sekolah melebihi rata-rata, sedangkan Provinsi lainnya berada di bawah rata-rata. Wilayah dengan rata-rata lama sekolah terkecil di Indonesia adalah Provinsi Papua rata-

rata lama sekolah 7,15 tahun yaitu sama dengan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selanjutnya, rata-rata lama sekolah terendah berturut-turut yaitu Kalimantan Barat serta Nusa Tenggara Barat selama 7,71 tahun serta 7,74 tahun. Kecilnya rata-rata lama sekolah dalam wilayah ini mengindikasikan program Bantuan Operasional Sekolah serta Wajib Belajar 12 Tahun sebelum mencapai hasil yang maksimal dan sesuai harapan. Idealnya, berlaku program dari pemerintah, masyarakat setempat seharusnya dapat mencapai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Dari latar belakang serta permasalahan yang ada, peneliti ingin menjalankan penelitian berjudul “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Inflasi, Upah Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2008-2022”.

1.2 Perumusan Masalah

Penjelasan latar belakang tersebut, rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2008-2022?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2008-2022?
3. Bagaimana pengaruh Upah terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2008-2022?
4. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2008-2022?

5. Bagaimana pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Inflasi, Upah dan Rata-Rata Lama Sekolah secara simultan terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2008-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2008-2022.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2008-2022.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Upah terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2008-2022.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2008-2022.
- e. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Inflasi, Upah dan Rata-Rata Lama Sekolah secara simultan terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2008-2022.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1). Penulis menghendaki hasil penelitian ini dapat memberikan bukti tertulis dan pengetahuan mengenai pengaruh jumlah angkatan kerja, inflasi, upah, dan rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 2008-2022.
- 2). Masyarakat Indonesia: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai keterkaitan antara jumlah

angkatan kerja, inflasi, upah minimum, dan rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 2008 hingga 2022

- 3). Kementrian Ketenagakerjaan: Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan serta arah strategi untuk perbaikan kinerja Kementrian Ketenagakerjaan Indonesia.
- 4). Kemdikbudristek: Sebagai informasi atau dapat sebagai bahan evaluasi program sistem kerja agar dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

b. Manfaat Teoritis

- 1). Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya mahasiswa atau mahasiswi Jurusan Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- 2). Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai jumlah angkatan kerja, inflasi, upah, dan rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran.
- 3). Akademisi: Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber untuk penelitian dan sebagai pengetahuan tambahan bagi pembaca. Khususnya mengenai dampak jumlah angkatan kerja, inflasi, upah, dan rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 2008 hingga 2022.